

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangguran telah menjadi ancaman langsung terhadap stabilitas ekonomi dan sosial dari setiap negara, yang pada gilirannya akan menghambat pembangunan manusia dan ekonomi. Mesir misalnya, memiliki tingkat pengangguran yang rata-rata 11,5% selama 10 tahun terakhir. Pemerintah Mesir berupaya mengurangi tingkat pengangguran dan memitigasi dampaknya melalui kebijakan fiskal yang diperlukan untuk mencapai keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan pengurangan pengangguran (Abouelfarag & Qutb, 2020).

Di negara berkembang seperti Afrika Sub-Sahara, pengeluaran publik merupakan instrumen penting dalam kebijakan sektor publik dalam mengurangi tingkat pengangguran. Disamping itu, pengeluaran publik telah berperan aktif dalam mengurangi tingkat kesenjangan, pembiayaan sosial, penciptaan infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti sarana transportasi dan komunikasi, pendidikan dan pelatihan, pertumbuhan barang modal industri, penelitian pembangunan, dan lain sebagainya (Onuoha, Oyeyemi, & Agbede, 2019).

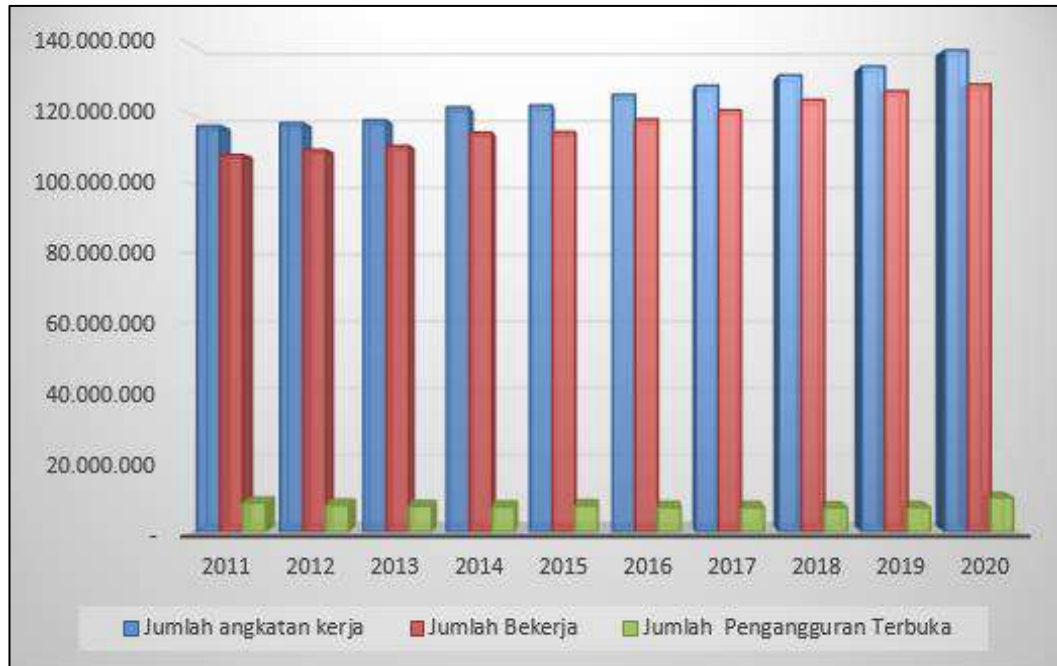
Di Indonesia, jumlah pengangguran semakin meningkat akibat tingginya tingkat migrasi dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan. Penduduk yang melakukan migrasi tersebut tidak memiliki keterampilan yang cukup sebagaimana yang dibutuhkan dunia kerja, hal ini menjadikan banyak penduduk yang menganggur dan menjadi penyebab timbulnya permasalahan kemiskinan (Mardiana *et. al*, 2017; Kamarni *et. al*, 2019; Farida *et. al*, 2022).

Kurangnya kesempatan kerja juga memperburuk situasi pengangguran di mana beberapa orang yang dapat dipekerjakan, dalam angkatan kerja, dengan kualifikasi, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan, mau dan ingin bekerja tetapi tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam istilah terkait, kekurangan dalam peluang pekerjaan mengarah pada kemalasan yang tidak disengaja dari orang-orang yang bersedia bekerja tetapi tidak dapat menemukan pekerjaan (Onuoha *et.al*, 2019).

Banyak faktor yang saling terkait dan terhubung menjadi penyebab masalah pengangguran. Kerumitan ini menjadi kendala masalah pengangguran sangat sulit diatasi baik oleh pemerintah pusat maupun bagi pemerintah daerah. Tingginya jumlah pengangguran memiliki dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat, dikarenakan orang-orang yang tidak bekerja berarti tidak memiliki pendapatan. Ketiadaan sumber pendapatan menjadikan masyarakat sulit dalam mencukupi kebutuhan mereka, dan akhirnya mengantarkan mereka masuk ke dalam jurang kemiskinan (Kaharudin, Kumenaung, & O.Niode, 2019).

Di Indonesia, jumlah penduduk angkatan kerja dan jumlah pengangguran terbuka mengalami perkembangan yang beragam dan cenderung meningkat dalam 10 tahun terakhir. Data Badan Pusat Statistik tahun 2011-2020 menunjukkan tren meningkat pada penduduk angkatan kerja dan penduduk yang bekerja (Gambar 1.). Tingkat pengangguran terbuka setiap tahunnya menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Tahun 2011 tingkat pengangguran terbuka berada diangka 8,32 juta jiwa atau 7,14% dari penduduk angkatan kerja. Tahun 2019 mengalami penurunan dan berada diangka 7,05 juta jiwa. Namun, peningkatan jumlah pengangguran kembali terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 38,63% dari tahun 2019 dan berada diangka 9,77 juta jiwa.

Data Survei Angkatan Kerja Nasional pada bulan Agustus 2020 menghitung rata-rata nasional TPT di Indonesia berada di angka 6,03% meningkat 28,04% dari tahun 2019. Sementara itu jika dibandingkan dengan TPT keadaan 2018, TPT 2019 cenderung menurun sebesar 3,01%. Peningkatan pengangguran terbuka di Indonesia merupakan imbas dari pandemi Covid-19 yang terjadi sejak akhir 2019, dimana banyak penduduk kehilangan mata pencaharian karena aktifitas perekonomian yang tidak berjalan dengan baik (Kamaruddin, Karimi, & Ridwan, 2021).



Sumber: BPS, Statistik Indonesia 2011-2020

Gambar 1. Angkatan Kerja, Bekerja dan Pengangguran Terbuka di Indonesia 2011-2020

Beberapa provinsi di Indonesia mengalami lonjakan jumlah pengangguran terbuka di tahun 2020, salah satunya adalah provinsi Sumatera Barat. Jika di lihat pada Gambar 2, terjadi lonjakan jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2020. Sebelumnya tahun 2019 jumlah pengangguran terbuka berada diangka 138.459 orang, meningkat menjadi 190.609 orang di tahun 2020, atau naik sebesar 37,66% dari tahun 2019. Padahal jika dilihat, tren dari tahun 2018 ke 2019 menunjukkan penurunan jumlah pengangguran yaitu sebesar 2,27%, yang mana jumlah pengangguran pada tahun 2018 ini sebanyak 141.680 orang. Lonjakan angka pengangguran terbuka di provinsi Sumatera Barat juga disebabkan banyaknya penduduk yang kehilangan pekerjaan yang merupakan imbas dari pandemi covid-19 di Indonesia.



Sumber: BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2010-2020

Gambar 2. Perkembangan Jumlah Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Barat 2010-2020

Berdasarkan data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia tahun 2020, Sumatera Barat berada di posisi ke delapan dari tiga puluh empat provinsi di Indonesia dengan TPT sebesar 6,88% dari TPAK (Tabel 1.).

Tabel 1. Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia tahun 2020

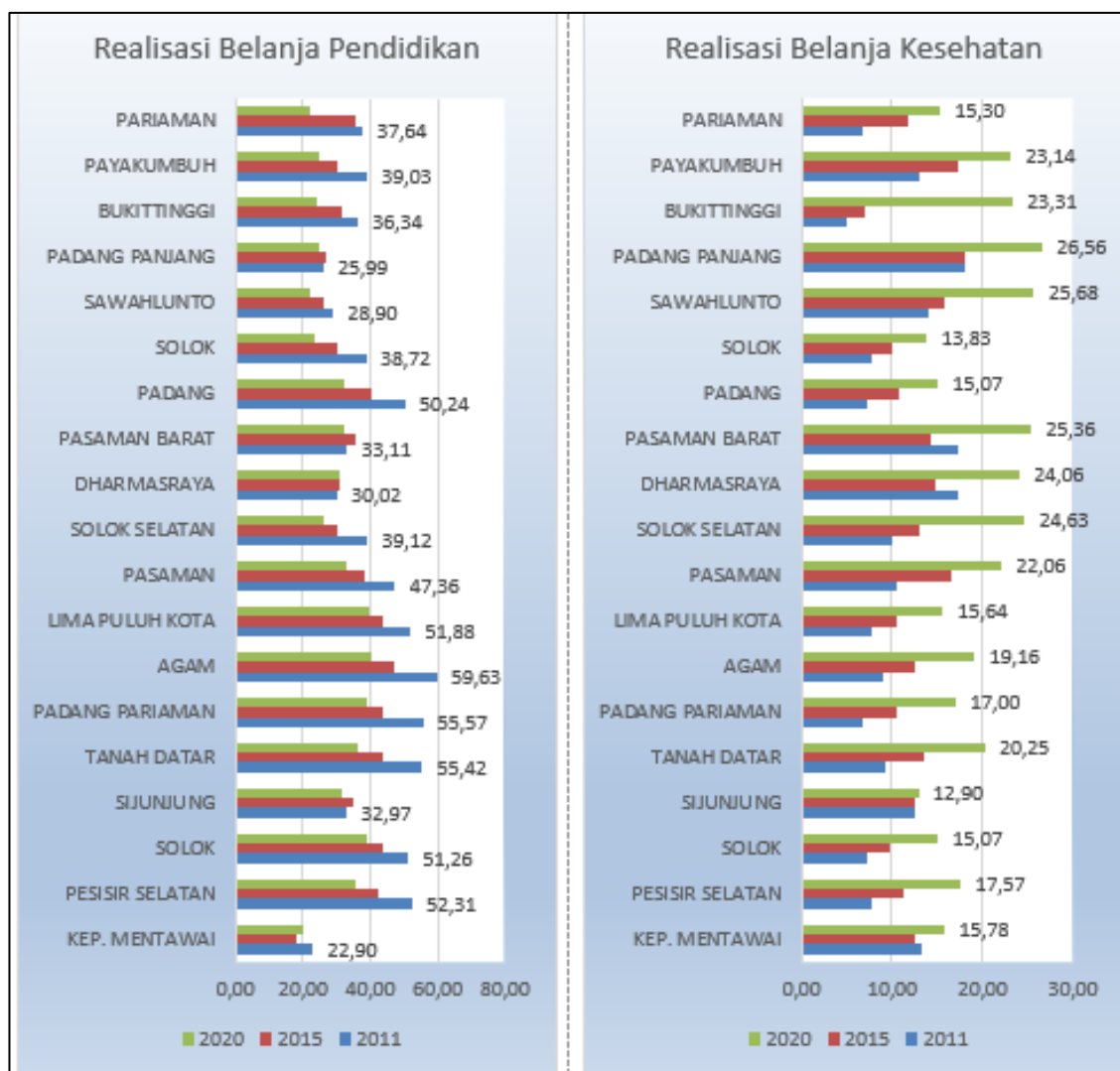
No.	Provinsi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	No.	Provinsi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
1	DKI Jakarta	63,81	10,95	18	Sumatera Selatan	68,65	5,51
2	Banten	64,48	10,64	19	Kep. Bangka Belitung	66,89	5,25
3	Jawa Barat	64,53	10,46	20	Mahuku Utara	64,28	5,15
4	Kepulauan Riau	66,28	10,34	21	Jambi	67,79	5,13
5	Mahuku	65,07	7,57	22	Kalimantan Utara	66,51	4,97
6	Sulawesi Utara	63,42	7,37	23	Kalimantan Selatan	69,33	4,74
7	Sumatera Utara	68,67	6,91	24	Lampung	70,16	4,67
8	Sumatera Barat	69,01	6,88	25	Sulawesi Tenggara	69,83	4,58
9	Kalimantan Timur	65,50	6,87	26	Kalimantan Tengah	68,40	4,58
10	Papua Barat	69,55	6,80	27	DI Yogyakarta	71,12	4,57
11	Aceh	65,10	6,59	28	Nusa Tenggara Timur	73,11	4,28
12	Jawa Tengah	69,43	6,48	29	Papua	72,16	4,28
13	Riau	65,24	6,32	30	Gorontalo	66,46	4,28
14	Sulawesi Selatan	63,40	6,31	31	Nusa Tenggara Barat	70,45	4,22
15	Jawa Timur	70,33	5,84	32	Bengkulu	71,73	4,07
16	Kalimantan Barat	68,83	5,81	33	Sulawesi Tengah	69,44	3,77
17	Bali	74,32	5,63	34	Sulawesi Barat	70,19	3,32

Sumber: BPS, Statistik Indonesia 2020

Data BPS Provinsi Sumatera Barat untuk keadaan angkatan kerja semester II per Agustus 2020, TPT Sumatera Barat sebesar 6,88% tersebut didominasi oleh pengangguran yang berasal dari tamatan SMA sebanyak 51.021 orang, SMK sebanyak 32.889 orang dan Universitas sebanyak 40.151 orang. Berdasarkan klasifikasi kelompok umur serta jenis kelamin, pengangguran terbuka di Sumbar rata-rata berusia diantara 20-29 tahun, data tersebut mengindikasikan bahwa jumlah pengangguran di Sumatera Barat lebih didominasi oleh laki-laki dibandingkan jumlah pengangguran perempuan. Sementara itu angka pengangguran lebih tinggi berada di daerah-daerah perkotaan (BPS, 2020).

Tingginya angka pengangguran terdidik yaitu pengangguran yang merupakan tamatan SLTA keatas (Adrimas, 2012), memerlukan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah Sumatera Barat terutama dari aspek pengeluaran pemerintah yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Gambar 3. merupakan persentase realisasi belanja pendidikan dan kesehatan terhadap realisasi belanja pemerintah daerah berdasarkan fungsi secara keseluruhan pada daerah-daerah di Sumatera Barat untuk tahun 2011, 2015, dan 2020.

Pada realisasi belanja pendidikan dapat dilihat persentase realisasi belanja tertinggi berada pada tahun 2011, namun cenderung menurun pada tahun-tahun berikutnya. Sementara itu, realisasi belanja kesehatan memiliki tren meningkat dari tahun 2011, persentase tertinggi berada pada tahun 2020. Pengeluaran pemerintah yang berfungsi sebagai penunjang kebutuhan pelayanan dasar pada bidang pendidikan dan kesehatan di Sumatera Barat ini cukup tinggi, namun pada kenyataannya berbanding terbalik dengan tingginya angka pengangguran di Sumatera Barat. Seharusnya pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk pelayanan dasar dapat mendorong terciptanya sumber daya manusia yang memiliki banyak keahlian dan siap pakai di dunia kerja maupun usaha di Sumatera Barat.



Sumber: DJPK Realisasi APBD 2011-2020

Gambar 3. Persentase Belanja Pendidikan dan Kesehatan di Sumatera Barat tahun 2011, 2015 dan 2020

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji peran pengeluaran pemerintah dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran. Penelitian yang dilakukan oleh Nepam, Singh, & Jaman (2021) di India menyatakan bahwa semua jenis pengeluaran pemerintah ditemukan positif dan signifikan artinya pengeluaran pemerintah meningkatkan pengangguran di negara berkembang. Hal ini sejalan dengan penelitian Abouelfarag & Qutb tahun 2020 bahwa kebijakan pengeluaran pemerintah tidak dapat mengurangi tingkat pertumbuhan pengangguran di Mesir. Temuan dari penelitian Seitaridis & Koulakiotis (2013) menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan kointegrasi antara tingkat pengangguran dengan total

pengeluaran umum pemerintah di 15 negara *eurozone*, tingkat pengangguran lebih tinggi disebabkan oleh tekanan politik untuk meningkatkan asuransi pengangguran dan program transfer lainnya.

Namun, Onuoha *et al.* (2019) telah melakukan penelitian di negara-negara Afrika yang mana menunjukkan hasil bahwa pengeluaran untuk infrastruktur dan pendidikan telah mengurangi tingkat pengangguran, sementara itu pengeluaran untuk kesehatan meningkatkan angka pengangguran di wilayah tersebut. Mardiana, dkk (2017) menemukan bahwa anggaran bidang pendidikan dan anggaran infrastruktur memiliki pengaruh langsung dan tidak berdampak cukup banyak bagi pengangguran, tetapi anggaran bidang kesehatan memberikan pengaruh langsung dan berdampak cukup besar terhadap angka pengangguran di Kalimantan Timur. Penelitian yang dilakukan Oladipo (2016) menunjukkan bahwa upaya untuk mengurangi kemiskinan membawa pengurangan tingkat pengangguran di Nigeria, dimana pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek modal mengurangi tingkat pengangguran di Nigeria dari waktu ke waktu.

Berbagai hasil penelitian sebelumnya yang mengkaji dampak pengeluaran/belanja pemerintah terhadap pengangguran di berbagai negara di dunia dan wilayah di Indonesia menyiratkan banyak pembahasan yang membutuhkan analisa dan kajian lebih dalam. Hal ini tentu membutuhkan bukti empiris, terutama untuk angka pengangguran di Provinsi Sumatera Barat. Maka dari itu penulis mencoba memberi judul pada kajian ini ***Pengeluaran Pemerintah dan Pengangguran di Sumatera Barat.***

B. Masalah Penelitian

Beranjak dari kondisi permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, yang menjadi fokus pembahasan kajian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengeluaran pemerintah mempengaruhi pengangguran di Sumatera Barat?
2. Bagaimana implikasi kebijakan dalam menanggulangi jumlah pengangguran di Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Kajian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan permasalahan yang telah dirumuskan, antara lain:

1. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pengangguran di Sumatera Barat.
2. Menentukan implikasi kebijakan dalam menanggulangi jumlah pengangguran di Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Lebih lanjut, hasil dari kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada :

1. Pemerintah

Memberikan informasi atau menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah provinsi dan daerah di Sumatera Barat, dalam merumuskan kebijakan di bidang pendidikan dan kesehatan yang berkaitan dengan kebijakan pengurangan angka pengangguran di Provinsi Sumatera Barat..

2. Akademisi

Agar menjadi bahan referensi atau literatur dalam pengembangan ilmu pengetahuan, yang erat kaitannya dengan penanggulangan pengangguran di Propinsi Sumatera Barat.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama berisi uraian latar belakang permasalahan, rumusan masalah yang diangkat, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian, serta sistematika penulisan dari penelitian.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab kedua berisi mengenai rancangan dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian dari berbagai sumber literatur seperti jurnal-jurnal penelitian, buku-buku pendukung, dan sumber-

sumber ilmiah lainnya. Penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi rujukan, kerangka pemikiran yang digunakan peneliti, dan hipotesis yang sesuai terkait dengan penelitian yang dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga akan membahas mengenai metode yang peneliti gunakan dalam menyelesaikan penelitian, memuat tentang jenis data penelitian dan sumber data penelitian, serta metode analisis penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat memaparkan hasil penelitian serta pembahasan terkait dengan pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan terhadap pengangguran di Sumatera Barat.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima berisi kesimpulan yang diperoleh dari penelitian serta rekomendasi-rekomendasi beberapa kebijakan yang dapat diusulkan.

